
Efektivitas Program Perencanaan Dan Pembangunan Melalui Temu Bisnis Kemitraan Provinsi Jawa Timur

Ririn Agustin Kartika Putri¹

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
E-mail: 23041010205@studentupnjatim.ac.id

Article History:

Received: 04 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

Keywords: Efektivitas, Keberlanjutan, IKM

Abstract: Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Jawa Timur, namun masih menghadapi keterbatasan akses pasar, kapasitas produksi, standar mutu, dan permodalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Temu Bisnis Kemitraan 2025 yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi lapangan dengan analisis efektivitas berdasarkan indikator Steers, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan kepuasan stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut efektif dalam memfasilitasi kemitraan antara IKM dan Industri Besar melalui forum business matching yang menghasilkan LoI dan MoU serta membuka peluang pasar baru bagi IKM. Namun, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan standar mutu, kontinuitas pasokan, dan kapasitas produksi, sehingga diperlukan pendampingan teknis, fasilitasi permodalan dan sertifikasi, serta monitoring berkelanjutan guna menjamin keberlanjutan kemitraan.

PENDAHULUAN

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Provinsi Jawa Timur, IKM menempati posisi yang sangat penting dengan jumlah unit usaha terbesar secara nasional serta kemampuan menyerap jutaan tenaga kerja. Peran tersebut menjadikan IKM sebagai penopang ekonomi daerah sekaligus penggerak industri berbasis kearifan lokal dan produk kreatif.

Meskipun demikian, posisi IKM dalam struktur industri masih relatif lemah, khususnya dalam menghadapi dominasi Industri Besar (IB). Berbagai permasalahan masih dihadapi oleh IKM, antara lain keterbatasan akses pasar, kapasitas produksi yang belum memadai, kesenjangan standar mutu dan sertifikasi, serta keterbatasan modal dan peralatan. Kondisi ini menyebabkan produk IKM sulit masuk ke dalam rantai pasok Industri Besar, padahal kebutuhan Industri Besar di Jawa Timur sangat beragam dan berpotensi menyerap produk IKM secara berkelanjutan.

Penelitian Ratnasari dan Kirwani (2013) menegaskan bahwa IKM memiliki peran vital

dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara Parasan dan Manoppo (2023) menunjukkan bahwa IKM berkontribusi signifikan dalam penanggulangan kemiskinan secara inklusif. Namun, Dwi Putra dan Eriyanti (2024) menemukan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya komunikasi bisnis, serta keterbatasan informasi mengenai standar Industri Besar menjadi faktor penghambat utama kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pelaku IKM.

Di sisi lain, Jawa Timur memiliki kawasan industri strategis seperti JIPE Gresik, Safe n Lock Sidoarjo, KIG Gresik, dan PIER Pasuruan yang dihuni oleh perusahaan nasional dan multinasional. Keberadaan kawasan industri ini membuka peluang besar bagi IKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok Industri Besar. Apabila sinergi tersebut dapat terwujud, maka akan tercipta dampak positif berupa perluasan pasar IKM, peningkatan daya saing produk, efisiensi rantai pasok Industri Besar, serta terciptanya multiplier effect bagi perekonomian daerah. Bismala, Handayani, dan Andriany (2018) menegaskan bahwa akses pasar yang stabil melalui kemitraan dengan Industri Besar merupakan faktor kunci dalam peningkatan daya saing IKM.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam menciptakan ekosistem kemitraan yang kondusif. Soares, Nurpratiwi, dan Makmur (2015) menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui program yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Prastika (2017) serta Prataman (2022) juga menegaskan bahwa efektivitas program pemberdayaan IKM sangat ditentukan oleh koordinasi antar stakeholder, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif pelaku usaha.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Temu Bisnis Kemitraan 2025 yang dirancang untuk mempertemukan IKM dan Industri Besar melalui forum business matching, promosi produk, dan penandatanganan kesepakatan kerja sama. Namun demikian, efektivitas program tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya benar-benar tercapai dan memberikan dampak berkelanjutan. Saputra dan Widiyarta (2021) menegaskan bahwa efektivitas program pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari dampak nyata dan keberlanjutan manfaatnya.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas Program Temu Bisnis Kemitraan 2025 dalam mendorong keberlanjutan IKM di Jawa Timur dengan menggunakan indikator efektivitas Steers yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan kepuasan stakeholder. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan kemitraan IKM–Industri Besar yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata effectiveness yang dimaknai dengan tingkat atau derajat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Soejono Soekanto dalam (Yusrizal, 2014). Efektivitas juga merupakan capaian tujuan yang telah direncanakan sejalan dengan anggaran yang telah ditentukan, waktu yang ditetapkan, serta personel yang sudah dipilih. Keberhasilan efektivitas juga dapat diukur dari apakah sasaran yang telah ditentukan tercapai atau tidak. Efektivitas merupakan sebuah ukuran yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran menurut Gibson dalam (Yusrizal, 2014).

Menurut Steers dalam (Taruna, 2021) efektivitas sering kali digunakan sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana suatu kelompok atau organisasi berhasil dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pencapaian hasil akhir, tetapi juga mencakup proses internal yang mendukung keberhasilan tersebut, seperti kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mengintegrasikan berbagai elemen, dan menjaga keseimbangan antara sumber daya yang dimiliki dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas dapat dihubungkan dengan berbagai indikator yang membantu mengukur kinerja organisasi secara lebih komprehensif. Beberapa indikator utama tersebut meliputi:

1. **Pencapaian Tujuan.** Pencapaian tujuan dipandang sebagai suatu proses yang mencakup seluruh Upaya. Maka dari itu, untuk memastikan tercapainya tujuan akhir dengan baik, diperlukan tahapan, baik dalam hal pembagian pencapaian bagiannya maupun pembagian waktu. Pencapaian tujuan melibatkan beberapa factor, seperti kurun waktu yang telah ditentukan, sasaran sebagai target yang konkret, serta dasar hukum.
2. **Integrasi.** Merupakan penilaian terhadap sejauh mana suatu organisasi mampu melakukan sosialisasi, membangun consensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Hal ini meliputi beberapa factor, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.
3. **Adaptasi.** Proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyeleraskan diri dengan perubahan di lingkungannya. Meliputi beberapa faktor, yaitu peningkatan serta sarana dan prasarana.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan IKM

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai bagian dari pembangunan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan. Prataman (2022) menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah mencakup fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Salah satu bentuk peran katalisator tersebut adalah penyelenggaraan program yang mempertemukan IKM dengan pasar potensial, termasuk kemitraan dengan Industri Besar.

Program Temu Bisnis Kemitraan merupakan wujud peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi akses pasar dan membangun jejaring bisnis antara IKM dan Industri Besar. Efektivitas program tersebut sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder. Prastika (2017) menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan IKM ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif pelaku usaha, sehingga sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder terkait menjadi faktor kunci.

Keberlanjutan Kemitraan IKM dan Industri Besar

Keberlanjutan kemitraan antara IKM dan Industri Besar menjadi kunci agar program pemberdayaan tidak berhenti pada transaksi jangka pendek, tetapi menghasilkan hubungan bisnis jangka panjang yang saling menguntungkan. Parasan dan Manoppo (2023) menegaskan bahwa hal ini membutuhkan komitmen kedua pihak: IKM meningkatkan kualitas, memenuhi standar, dan menjaga kontinuitas pasokan, sementara Industri Besar memberikan pembayaran yang adil, umpan balik konstruktif, serta dukungan pelatihan dan pendampingan. Selain itu, pemerintah daerah berperan sebagai mediator dan fasilitator melalui monitoring dan evaluasi berkala, konsultasi teknis dan regulasi, serta dukungan akses permodalan dan teknologi. Dengan demikian, Temu Bisnis Kemitraan tidak hanya berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi berlanjut pada implementasi dan evaluasi untuk menjamin manfaat yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas Program Temu Bisnis Kemitraan 2025 dalam mendorong keberlanjutan IKM Jawa Timur. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif menurut Sugiyono dalam (Restita, 2020), peneliti

.....

bertindak sebagai instrumen kunci dengan menggunakan teknik triangulasi dan analisis induktif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Fokus pada indikator efektivitas Steers yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan kepuasan stakeholder. Data primer diperoleh melalui wawancara singkat dengan pihak terkait, sementara data sekunder bersumber dari dokumen resmi program, laporan kegiatan, dan literatur terkait. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Temu Bisnis Kemitraan 2025 merupakan inisiatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat kemitraan antara Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Industri Besar (IB) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 83 Tahun 2024, yang dilaksanakan pada periode September–November 2025 dengan tujuan mempertemukan kedua pihak guna membuka peluang kerja sama bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan, melalui kegiatan presentasi produk, sesi temu bisnis, penandatanganan kesepakatan, serta networking, dengan efektivitas program dianalisis menggunakan indikator Steers.

Pencapaian Tujuan

Analisis pencapaian tujuan Program Temu Bisnis Kemitraan 2025 dilakukan dengan melihat sejauh mana program mampu memenuhi empat tujuan utama yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja. Tujuan pertama, yaitu mempertemukan IKM dengan Industri Besar di kawasan industri Jawa Timur, dapat dikatakan tercapai. Setiap kegiatan diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari Sentra IKM dan perwakilan Industri Besar di kawasan JIPE Gresik, Safe n Lock Sidoarjo, dan KIG Gresik (Disperindag, 2025). Keikutsertaan berbagai sentra IKM dengan produk unggulan yang beragam menunjukkan tingginya partisipasi dan minat dari kedua pihak.

Tujuan kedua adalah membuka peluang hubungan bisnis antara IKM dan Industri Besar. Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Industri menunjukkan bahwa Industri Besar memiliki kebutuhan rutin yang dapat dipenuhi oleh IKM, seperti makanan olahan, seragam kerja, furnitur, cinderamata, dan kemasan pendukung. Industri Besar menilai program ini membantu mereka mengenal produk IKM lokal yang berpotensi menjadi mitra usaha jangka panjang, sekaligus mendukung penguatan ekonomi daerah.

Tujuan ketiga, yaitu promosi dan pengenalan produk IKM kepada Industri Besar, juga tercapai melalui penyediaan booth pameran dan sesi presentasi Sentra IKM. Observasi menunjukkan bahwa pelaku Industri Besar cukup antusias, terlihat dari diskusi mengenai spesifikasi produk, harga, dan kapasitas produksi. Hal ini menandakan bahwa Temu Bisnis menjadi sarana promosi yang efektif bagi IKM.

Tujuan keempat berkaitan dengan terbentuknya forum bisnis yang berorientasi pada transaksi dan keberlanjutan. Penandatanganan LoI atau MoU telah dilakukan sebagai bentuk komitmen awal, namun realisasi transaksi umumnya memerlukan proses lanjutan, seperti uji sampel, pemenuhan standar, dan penyesuaian kapasitas produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa program berhasil membuka peluang kemitraan, tetapi keberlanjutan hubungan usaha masih membutuhkan pendampingan pasca kegiatan. Sejalan dengan Prataman (2022), peran pemerintah daerah perlu diperkuat melalui monitoring, fasilitasi sertifikasi, serta peningkatan kapasitas IKM agar kesepakatan yang terbentuk dapat berkembang menjadi kemitraan bisnis yang berkelanjutan.

Integrasi

Indikator integrasi dalam Program Temu Bisnis Kemitraan 2025 digunakan untuk menilai tingkat koordinasi dan sinergi antar stakeholder yang terlibat. Menurut Steers (1985) dalam Saputra dan Widiyarta (2021), integrasi yang baik antar unit kerja dan pihak eksternal merupakan unsur penting dalam efektivitas program. Dalam konteks ini, integrasi dianalisis melalui integrasi internal, eksternal, dan vertikal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berjalan cukup baik. Koordinasi antarbidang dilakukan secara rutin sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, mencakup perencanaan anggaran, kurasi IKM, penentuan Industri Besar sasaran, serta persiapan teknis dan administrasi. Koordinasi yang intensif ini membantu meminimalkan kendala dan mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Integrasi eksternal juga terlihat dari kerja sama dengan pengelola kawasan industri, Industri Besar, serta pemerintah kabupaten/kota. Pengelola kawasan industri berperan aktif dalam menghubungkan tenant Industri Besar dengan program, sementara pemerintah kabupaten/kota mendukung melalui seleksi dan pendampingan Sentra IKM yang berpotensi. Selain itu, keterlibatan akademisi dan asosiasi industri memperkaya program melalui transfer pengetahuan, perluasan jejaring, dan peningkatan peluang kemitraan.

Secara keseluruhan, tingkat integrasi dalam Program Temu Bisnis Kemitraan 2025 tergolong baik dan mendukung efektivitas program. Sinergi antar stakeholder memperkuat legitimasi program, memperluas akses pasar, serta mendorong keberlanjutan IKM. Namun, diperlukan optimalisasi waktu dan kualitas interaksi antar pihak agar dampak peningkatan kapasitas dan kesejahteraan IKM Jawa Timur dapat lebih maksimal.

Adaptasi

Indikator adaptasi dalam Program Temu Bisnis Kemitraan 2025 menunjukkan kemampuan program untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan, tantangan, dan dinamika yang dihadapi oleh IKM maupun Industri Besar. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, program ini relatif adaptif dalam merespons perbedaan karakteristik IKM, baik dari sisi skala usaha, jenis produk, maupun tingkat kesiapan standar mutu. Hal ini tercermin dari proses kurasi Sentra IKM yang disesuaikan dengan kebutuhan Industri Besar di kawasan industri, serta fleksibilitas format kegiatan yang mengombinasikan pameran produk, presentasi, talkshow, dan business matching.

Selain itu, program juga menunjukkan adaptasi melalui pemberian ruang dialog dua arah, dimana IKM memperoleh informasi langsung terkait standar teknis, volume produksi, dan kebutuhan pasar Industri Besar. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa adaptasi program masih lebih kuat pada tahap pelaksanaan kegiatan dibandingkan pada tahap pasca kegiatan. Beberapa IKM mengalami kendala dalam menindaklanjuti peluang kemitraan karena keterbatasan sertifikasi, kapasitas produksi, dan kesiapan manajerial. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan adaptasi program melalui pendampingan lanjutan yang lebih sistematis agar program tidak hanya adaptif secara konseptual, tetapi juga berkelanjutan secara implementatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Temu Bisnis Kemitraan 2025 dinilai **cukup efektif** dalam mendorong keberlanjutan IKM di Provinsi Jawa Timur. Ditinjau dari indikator efektivitas Steers, program ini mampu mencapai tujuan awal berupa mempertemukan IKM dengan Industri Besar dan membuka peluang kemitraan usaha. Integrasi antar stakeholder berjalan relatif baik dan mendukung pelaksanaan program, sementara adaptasi program terlihat pada fleksibilitas pelaksanaan dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar Industri Besar. Namun demikian, efektivitas program masih bersifat parsial karena keberlanjutan kemitraan belum sepenuhnya terjamin akibat keterbatasan pendampingan dan tindak lanjut pasca kegiatan.

.....

Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat pendampingan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi pasca Temu Bisnis agar kemitraan yang terbentuk dapat berkembang secara jangka panjang. Pelaku IKM perlu meningkatkan kesiapan usaha, khususnya dalam pemenuhan standar dan kapasitas produksi, sementara Industri Besar diharapkan memberikan dukungan pembinaan serta komitmen kemitraan yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang program dengan pendekatan dan indikator yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Bismala, L., Handayani, S., & Andriany, D. (2018). Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. (2025). KAK Temu Bisnis Kemitraan 2025.
- Dwi Putra, P., & Eriyanti, F. (2024). Faktor Penghambat Kolaborasi DISPERINDAG, DUDI, dan Pelaku IKM Dalam Meningkatkan Pemasaran Hasil Pengolahan Ikan di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1818>
- Parasan, P. M., & Manoppo, V. (2023). Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Peran Industri Kecil Menengah dalam Menanggulangi Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1).
- Prastika, H. C. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. Thesis (Skripsi), 53.
- Prataman, M. D. S. dan A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137–143. <https://jkip.ejournal.unri.ac.id>
- Ratnasari, A., & Kirwani. (2013). Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1.
- Restita, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tari Kreatif Terhadap Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini (Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak- Kanak Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Tahun Ajaran 2019-2020) [Universitas Pendidikan Indonesia]. <https://repository.upi.edu/52502/>
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 194–211. <https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497>
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi*, 4(2), 42401.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. <https://repository.uin-suska.ac.id/13822/>
- Yusrizal. (2014). Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten RokahN Hulu di Tinjau Dari Ekonomi Islam [Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.]. <https://repository.uin-suska.ac.id/7271/>
-